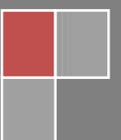




**RENCANA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025**

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN  
ANAK KOTA SAMARINDA





## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilandasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berdasarkan prestasi kerja.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi ke depan yang akan dicapai, upaya yang harus dilakukan dan kegiatan sebagai tindakan nyata pencapaian tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi setiap *stakeholder* dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam memenuhi hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026, sehingga sasaran utama penyusunan Renja ini sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Disamping itu juga mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur urusan wajib dan urusan pilihan instansi Pemerintah lingkup Departemen Dalam Negeri dan Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008



tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan RPJMD Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunannya dilakukan melalui tahapan perubahan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk perencanaan yang realistis dan dapat dilaksanakan, yang disertai dengan masukan dari berbagai pihak.

Namun demikian kami menyadari dalam penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami berharap bantuan semua pihak untuk memberikan data dan informasi yang lebih tepat dan akurat untuk penyusunan rencana selanjutnya.

Akhirulkalimat, bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta untuk lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. di Kota Samarinda serta demi terwujudnya Kota Samarinda yang sejahtera melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu kerjasama dari semua pihak.

Semoga Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini berguna bagi pembangunan di Kota Samarinda pada umumnya dan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada khususnya.

Samarinda, 14 Februari 2025  
Kepala Dinas,



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd  
NIP.197504022003122006



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP2PA .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP2PA.....	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak .....	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	47
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DP2PA .....	53
3.3 Program dan Kegiatan .....	53
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DP2PA</b>	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DP2PA .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	90



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel T-C.29</b> Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DP2PA .....	13
<b>Tabel T-C.30</b> Pencapaian Kinerja Pelayanan DP2PA Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 .....	31
<b>Tabel T-C. 31</b> Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	38
<b>Tabel 3.1</b> Diagram IPG Provinsi Kaltim 2015-2019.....	51
<b>Tabel 3.2</b> Diagram IDG Provinsi Kaltim 2015-2019 .....	52
<b>Tabel T-C. 33</b> Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	60
<b>Tabel 4.1</b> Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 .....	73



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Samarinda dalam menyelenggarakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan Akhir Rencana Kerja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan



dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025 yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan RPJMD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Bersama Tiga Menteri : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



26. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
27. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
28. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
29. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking perempuan dan anak);
30. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
31. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/1/18/2/2021);
32. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
34. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;



35. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
36. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
40. Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 14 Nopember 2020;
41. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;

### **1.3 Maksud dan tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memasukkan program dan kegiatan yang merupakan



prioritas Perangkat Daerah dan hasil dari Musrenbang yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA**



- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK**

**BAB V PENUTUP**



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2024 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2024, telah memenuhi target yang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, hal ini dapat dilihat dari kinerja tahun anggaran 2024 secara garis besar sudah tercapai dari rencana target yang diharapkan. Tidak tercapainya target maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya penghematan dan efisiensi dana kegiatan;
2. Terdapat beberapa program/kegiatan yang masih belum dapat dilaksanakan padahal sudah diproyeksikan akan tercapai pada pelaksanaan program pembangunan tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda diprediksi permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran Pokja Pengarusutamaan Gender dan Pelaksanaan PPRG;
2. Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan;



3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Masih rendahnya peran ibu dalam pendidikan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu :

1. Masih dimungkinkan tinggi kasus kekerasan perempuan dan anak;
2. Masih dimungkinkan penurunan perkawinan usia anak;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak;
4. Meningkatnya layanan pencegahan, penanganan dan rujukan dalam kasus kekerasan perempuan dan anak;
5. Meningkatnya peran serta Perangkat Daerah dalam melaksanakan Implementasi PUG melalui PPRG dan digunakan dalam mengambil kebijakan;
6. Masih dimungkinkan naiknya peringkat Kota Layak Anak (KLA) dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

1. Melakukan advokasi untuk menambah anggaran pemenuhan sarana prasarana yang mendukung Kota Layak Anak;
2. Melaksanakan inovasi percepatan implementasi PUG yaitu GESIT (*Gender Budget Analysis With Simple Think*);
3. Membuat regulasi berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Instruksi Walikota dan Surat Edaran Walikota yang mengatur tentang



- pelaporan, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak Kota Samarinda dengan sasaran tempat kerja, rumah tangga dan fasilitas umum;
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia di Dinas, UPTD PPA dan Puspaga agar dapat melaksanakan pelayanan yang standar, profesional dan komprehensif dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
  5. Melaksanakan peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum agar dapat berdepan aktif dalam pembangunan;
  6. Melakukan kerjasama dan memperluas jejaring dengan OPD, instansi vertikal, Organisasi masyarakat, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam rangka mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan orkestrasi dalam mengintegrasikan kegiatan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan OPD, instansi vertikal, Organisasi masyarakat, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa untuk mewujudkan Samarinda Menuju Kota Layak Anak, Samarinda Ramah Perempuan dan Ramah Anak, serta Samarinda Sebagai Pusat Kota Peradaban.



Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pencapaian Renstra DP2PA s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			target Program / kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10-(5+_7+9)*	11-(10/4)*
	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	68.69	-	-		-	68.65		
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Pelebagaan PUG	3 Dokumen		51 PD		100%	3 Dokumen	51 PD	100%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 PD	10 PD				40 PD		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			target Program / kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-			-	3 Dokumen		-
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota	40 PD			-	-	-	-	-
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	250 Orang	-	25		100%	25 Organisasi	25	100%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi		25		100%	25 Organisasi	25	100%
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ kota</b>	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan	2 Layanan		-		-	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	-	-		-	-	-	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	-	-		-	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			target Program / kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0.036%					0.038%		
	<b>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</b>	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	120 Kasus		-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 PD	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan	70 Kasus							
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	70 Kasus	40 Org	45 orang	90%	50 orang	45 orang	90%	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	70 orang	130 Org	45 orang	90%	50 orang	45 orang	90%	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	1 lembaga							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 laporan	5 Lap				-		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) Kegiatan / ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			target Program / kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota</b>	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	40 orang	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Orang	80 Org	50 orang	100%	50 orang	50 orang	100%	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	persentase perkawinan anak	1,85 %				1,95 %			
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi	8 lembaga		8 Lembaga	100%	8 Lembaga	8 Lembaga	100%	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	8 lembaga	5 Lembaga	8 Lembaga	100%	8 Lembaga	8 Lembaga	100%	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	-	100 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	100%	
	<b>Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota</b>	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	300 Keluarga	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	5 Layanan	-	-	-	-	-	-	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			target Program / kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	4 dokumen		4 Dokumen		100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah kota</b>	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	4 dokumen		4 Dokumen		100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kota	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	4 dokumen	2 Dok	4 Dokumen		100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Kota Layak Anak	800 s/d 900					700 s/d 800		
	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota</b>	Dokumen KLA	7 dokumen					7 Dokumen		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 dokumen	7 Dok	8 Dokumen		100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 organisasi	-	30 Organisasi		100%	30 Organisasi	30 Organisasi	100%
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	20 Lembaga		1 Laporan		100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	3 Dok	110 Orang		100%	110 Orang	110 Orang	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5 Dok	3 Dokumen		100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Pengembangan KIE Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	-	3 Dokumen		100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) Kegiatan / ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			target Program / kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	5 Dok	3 Dokumen		100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	persentase kasus kekerasan terhadap anak	1.60 %							
	<b>Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota	120 Kasus							
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	14 Kegiatan	2 Dok						
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Aktivist PATBM yang mendapat pelatihan	150 orang							
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	120 orang	4 Dok						
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 Lembaga		-		-	-	-	-
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	15 Orang		-		-	-	-	-
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kota (UPTD)	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	80 anak		-		-	-	-	-
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	-			-	110 Orang		-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> ) Kegiatan / ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			target Program / kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.5					89.5		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai AKIP	74		68,25		94,79%	72	68,25	94,79%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 Dok	7 Dokumen		100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 Dok	14 laporan		100%	14 laporan	14 laporan	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	-	4 laporan		100%	4 Laporan	4 laporan	100%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	12 laporan					28 Laporan		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	38 Org	40 Orang/bulan		100%	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	100%
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	14 Org	14 Dokumen		100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	13 Dok	2 Laporan		100%	2 Laporan	2 Laporan	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )Kegiatan / ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			target Program / kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	laporan rencana kebutuhan barang	1 laporan							
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	-	4 unit		100%	4 unit	4 unit	100%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan	4 Laporan							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 Paket	3 paket		100%	3 paket	3 paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	3 Paket	2 paket		100%	2 paket	2 paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	5 Paket	5 Paket		100%	5 Paket	5 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 Paket	4 Paket		100%	4 Paket	4 Paket	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan		1 Laporan		100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	-	-		-	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	19 Lap	10 Laporan		100%	10 Laporan	10 Laporan	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan / (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			target Program / kegiatan Renja PD tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	3 Laporan		100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	12 Laporan	11 Laporan		100%	11 Laporan	11 Laporan	100%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Pemeliharaan	4 laporan							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit	13 unit	13 Unit		100%	13 Unit	13 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 Unit		100%	2 Unit	2 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	13 unit	33 Unit		100%	33 Unit	33 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	2 unit	1 Unit		100%	1 Unit	1 Unit	100%



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan Pelayanan tahun-tahun sebelumnya. sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi Pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya.

Dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan Renstra telah menghasikan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pelayanan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum di daya gunakan secara optimal. Kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Sasaran program kegiatan tahun 2024 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya. Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk SPM ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda memiliki 2 (dua) acuan yaitu ;

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010;



2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan prioritas/ acuan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pelayanan melalui tahapan yang sudah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 masing-masing bidang melaksanakan kegiatan, yaitu dengan melaksanakan 7 program, 21 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### **PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

#### **Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kab/kota**

1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
3. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG

#### **Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota**

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.



**Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota**

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota
2. Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota

**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

**Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Kegiatan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota**

1. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota



## **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

### **Kegiatan pencegahan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota**

1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota
2. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota.

### **Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota**

1. Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota
2. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

## **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

### **Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kab/kota**

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota

## **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

### **Kegiatan pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kab/kota**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha



Kewenangan Kab/Kota

2. Koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kabupaten/Kota

**Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota**

1. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
2. Pengembangan KIE Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota

**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

**Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota**

1. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA.

**Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota**

1. Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK



**Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota**

1. Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan bahan logistik kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Fasilitasi kunjungan tamu



6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

**Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Mebel

**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

**Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD)**

**Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota**

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota



**Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota**

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota

**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

**Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota**

1. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota.



**Tabel T-C. 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Samarinda**

NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Permen PPA No.3 Tahun 2023	Presentase ARG pada belanja langsung APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Permen PPA No.3 Tahun 2023	Presentase ARG pada belanja langsung APBD	20 PD	40 PD	50 PD	60 PD	20 PD			50 PD	60 PD	
3	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Termasuk Kewenangan Kabupaten/Kota	Permen PPA No.3 Tahun 2023		20 PD	40 PD	50 PD	60 PD	20 PD			50 PD	60 PD	
4	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Permen PPA No.3 Tahun 2023		10 organisasi	10 organisasi	30 organisasi	40 organisasi	10 organisasi			30 organisasi	40 organisasi	
5	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				2 lembaga	3 lembaga	1 lembaga				3 lembaga	1 lembaga	
6	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 orang	30 orang	10 orang				30 orang	10 orang	



NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Capaian		Tahun 2025	Tahun 2026	
								Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan			8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga		8 Lembaga	8 Lembaga	
8	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			3 orang	50 orang	60 orang	100 orang	3 orang		60 orang	100 orang	
9	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota				4 Layanan	5 Layanan	6 Layanan			5 Layanan	6 Layanan	
10	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
11	Jumlah Perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota				2 PD	2 PD	2 PD			2 PD	2 PD	
12	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota				40 Orang	50 Orang	60 Orang			50 Orang	60 Orang	
13	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik			50 Orang	10 Orang	20 Orang	30 Orang	50 Orang		20 Orang	30 Orang	
14	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang		70 Orang	70 Orang	
15	Jumlah laporan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan			3 Laporan	4 Laporan	
16	Jumlah Dokumen data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	
17	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			110 Orang	125 Orang	150 Orang	200 Orang	110 Orang		150 Orang	200 Orang	
18	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	



NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Capaian		Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	
20	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	
21	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi		30 Organisasi	30 Organisasi	
22	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	
23	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu			1 Dokumen	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	1 Dokumen		14 Kegiatan	14 Kegiatan	
24	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			2 Dokumen	125 orang	120 orang	115 orang	2 Dokumen		120 orang	115 orang	
25	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				10 Orang	15 Orang	20 Orang			15 Orang	20 Orang	



NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang		80 Orang	80 Orang	
27	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	5 Dokumen	17 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen		17 Dokumen	5 Dokumen	
28	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	
29	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	
30	Jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah					2 Berita Acara	2 Berita Acara			2 Berita Acara	2 Berita Acara	
31	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40 orang	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 orang		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	
32	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	
33	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	
34	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket		4 Paket	4 Paket	
35	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket		3 paket	3 paket	



NO.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Capaian		Tahun 2025	Tahun 2026	
								Tahun 2023	Tahun 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket		2 paket	2 paket	
37	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket		5 Paket	5 Paket	
38	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket		4 paket	4 paket	
39	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
40	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	
41	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan		3 laporan	3 laporan	
42	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan		11 laporan	11 laporan	
43	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit		13 Unit	13 Unit	
44	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit		2 unit	2 unit	
45	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit		33 unit	33 unit	
46	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	



### **2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.**

Isu-Isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih di hadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikemukakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi integritas (daerah / masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang dihasilkan selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah (RPJMD) 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas sektor dalam mengangkat isu gender dan data pilah dalam dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan;
3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
4. Penurunan dan Pencegahan Pekerja dan Perkawinan Anak.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2025 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) berdasarkan usulan program dan kegiatan dari Perangkat



Daerah yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2025, yang terdiri dari 7 program, 22 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2025 dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Tabel T-C. 31  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Samarinda

No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	IKM	90,5	8,768,981,527	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	IKM	90,5	8,768,981,527	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai AKIP	74	95,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai AKIP	74	95,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	6 Dokumen	65,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	6 Dokumen	65,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	5,000,000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,000,000.00	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5,000,000.00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5,000,000.00	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Samarinda	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5,000,000.00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Samarinda	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5,000,000.00	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5,000,000.00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	5,000,000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	5,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	5,000,000.00	



No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Samarinda	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>12 laporan</b>	<b>6,918,942,000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Samarinda	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>12 laporan</b>	<b>6,918,942,000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bulan	6,166,697,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bulan	6,166,697,000.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen	702,245,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen	702,245,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Laporan	50,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Laporan	50,000,000.00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Samarinda	<b>Jumlah pegawai</b>	<b>44 orang</b>	<b>204,000,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Samarinda	<b>Jumlah pegawai</b>	<b>44 orang</b>	<b>204,000,000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	104,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	104,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 Orang	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 Orang	50,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	50,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	50,000,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Samarinda	<b>Jumlah laporan</b>	<b>4 laporan</b>	<b>295,616,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Samarinda	<b>Jumlah laporan</b>	<b>4 laporan</b>	<b>295,616,000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	21,218,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	21,218,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	10,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	10,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	21,218,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	21,218,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	10,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 Laporan	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 Laporan	15,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	212,180,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	212,180,000	



No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Laporan rencana kebutuhan barang	1 laporan	910,423,527	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Laporan rencana kebutuhan barang	1 laporan	910,423,527	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	500,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	500,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	350,423,527	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	350,423,527	
	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	50,000,000	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	50,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	160,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	160,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 Laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 Laporan	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	150,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	150,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pemeliharaan	4 laporan	185,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pemeliharaan	4 laporan	185,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan bayar pajaknya	13 Unit	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan bayar pajaknya	13 Unit	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 unit	25,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit	10,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	



No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
2	<b>Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</b>	Samarinda	<b>Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan</b>	<b>68,69</b>	<b>1,030,024,163</b>	<b>Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</b>	Samarinda	<b>Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan</b>	<b>68,69</b>	<b>1,030,024,163</b>	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelebagaan PUG	3 Dokumen	630,024,163	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelebagaan PUG	3 Dokumen	630,024,163	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150,023,460	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	150,023,460	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Samarinda	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	200 Orang	275,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Samarinda	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	200 Orang	275,000,000	
	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Samarinda	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	235 orang	205,000,703	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Samarinda	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	235 orang	205,000,703	
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Samarinda	<b>Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja</b>	<b>250 orang</b>	<b>150,000,000</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Samarinda	<b>Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja</b>	<b>250 orang</b>	<b>150,000,000</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Samarinda	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi	150,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Samarinda	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi	150,000,000	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Samarinda	<b>Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>2 layanan</b>	<b>250,000,000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Samarinda	<b>Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>2 layanan</b>	<b>250,000,000</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga	125,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga	125,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	125,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	125,000,000	



No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan				
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Program Perlindungan Perempuan	Samarinda	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,034%	675,499,000	Program Perlindungan Perempuan	Samarinda	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,034%	675,499,000
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	110 kasus	337,748,000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	110 kasus	337,748,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	168,874,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	168,874,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat daerah	168,874,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat daerah	168,874,000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	2 lembaga	337,751,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	2 lembaga	337,751,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 orang	168,874,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 orang	168,874,000
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	500 Orang	168,877,000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	500 Orang	168,877,000



No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan				
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11
4	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	Samarinda	persentase perkawinan anak	1,85%	695,251,473	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	Samarinda	persentase perkawinan anak	1,85%	695,251,473
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi	8 Lembaga	245,675,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi	8 Lembaga	245,675,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 lembaga	100,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 lembaga	100,000,000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	145,675,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	145,675,000
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	300 keluarga	449,576,473	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	300 keluarga	449,576,473
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 layanan	449,576,473	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 layanan	449,576,473
	5	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</b>	Samarinda	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	4 dokumen	318,270,000	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</b>	Samarinda	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	4 dokumen
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Samarinda	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	4 dokumen	318,270,000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	4 dokumen	318,270,000
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Samarinda	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	318,270,000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	318,270,000



No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
6	<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	Samarinda	<b>Kota Layak Anak</b>	<b>800 s/d 900</b>	<b>1,166,990,000</b>	<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	Samarinda	<b>Kota Layak Anak</b>	<b>800 s/d 900</b>	<b>1,166,990,000</b>	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Dokumen KLA	7 dokumen	693,720,000	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Dokumen KLA	7 dokumen	693,720,000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	40 organisasi	125,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	40 organisasi	125,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 dokumen	568,720,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 dokumen	568,720,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	20 lembaga	473,270,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	20 lembaga	473,270,000	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	95,000,000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	95,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	100,000,000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	170,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	170,000,000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	108,270,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	108,270,000	



No.	Program/Kegiatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	Samarinda	persentase kasus kekerasan terhadap anak	1,60%	254,360,000	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	Samarinda	persentase kasus kekerasan terhadap anak	1,60%	254,360,000	
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Samarinda	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota	120 kasus	84,786,000	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Samarinda	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota	120 kasus	84,786,000	
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Samarinda	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	4 Kegiatan	84,786,000	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Samarinda	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	4 Kegiatan	84,786,000	
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Samarinda	Jumlah Aktifis PATBM yang mendapat pelatihan	150 orang	84,786,000	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Samarinda	Jumlah Aktifis PATBM yang mendapat pelatihan	150 orang	84,786,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Samarinda	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	170 layanan	84,786,000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Samarinda	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	170 layanan	84,786,000	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Samarinda	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 lembaga	84,788,000	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Samarinda	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 lembaga	84,788,000	
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Samarinda	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	220 orang	84,788,000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Samarinda	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	220 orang	84,788,000	
<b>Program Perlindungan Perempuan (UPTD)</b>	Samarinda	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,034%	375,000,000	<b>Program Perlindungan Perempuan (UPTD)</b>	Samarinda	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,034%	375,000,000		
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Samarinda	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan	70 orang	315,000,000	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Samarinda	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan	70 orang	315,000,000		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	200 orang	315,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	200 orang	315,000,000		



No.	Program/Kegiatan	Program/Kegiatan				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 lembaga	60,000,000	Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD)		Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 lembaga	60,000,000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	60,000,000			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	60,000,000	
	Program Perlindungan Khusus Anak (UPTD)	Samarinda	persentase kasus kekerasan terhadap anak	1.60%	170,000,000			persentase kasus kekerasan terhadap anak	1.60%	170,000,000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	80 anak	170,000,000			Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	80 anak	170,000,000	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	85 orang	170,000,000			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	85 orang	170,000,000	
					13,454,376,163					13,454,376,163	



## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda maka sejak tahun 2022 Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tupoksi menelaah usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang tingkat Kecamatan telah dipindahkan ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu sejak tahun 2022 tidak dilakukan telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.



### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar Tingkat Pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya Pembangunan Daerah. Disamping itu Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) PBB, salah satu indikator kesejahteraan Negara adalah kesetaraan gender. Negara belum dikatakan maju bila perempuan dan anak belum berada di ranah aman. Dalam banyak hal perempuan di Indonesia telah mencapai kemajuan pesat, meskipun hambatan utama menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya meningkatnya keadilan gender merupakan hal yang secara



ekonomi masuk akal. Mengharusutamakan masalah gender ke dalam inisiatif, strategi, kebijakan, sasaran dan target pembangunan memerlukan pengertian menyeluruh atas konteks dinamika Gender.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda harus memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2021-2026, dengan mendukung peningkatan pencapaian hasil salah satu program unggulan yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu *Program Three Ends*, Program 3 End meliputi *End Violence Against Woman And Children* (akhiri kekerasan pada wanita dan anak), *End Human Trafficking* (akhiri perdagangan manusia), *End Barriers to Economic Justice* (akhiri kesenjangan ekonomi), dengan mengadakan sosialisasi, penanganan kasus korban kekerasan dengan konseling serta rumah aman. Juga menekankan perlunya peran media massa dalam mendukung isu responsif gender dan memahami tentang hak anak.

Media massa dapat menjadi mitra pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dan menjalankan pemberitaan terkait perempuan dan anak yang berimbang. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan program 3 end ini yaitu :

#### 1. Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- Informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat
- Berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak
- Berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah
- Dukungan yang massif dari pemangku kepentingan (K/L, Pemda, Lembaga Masyarakat)



## 2. Akhiri Perdagangan Manusia

- Terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak)
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia
- Terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas TPPO
- Memastikan setiap calon TKW mendapatkan pelatihan yang memadai

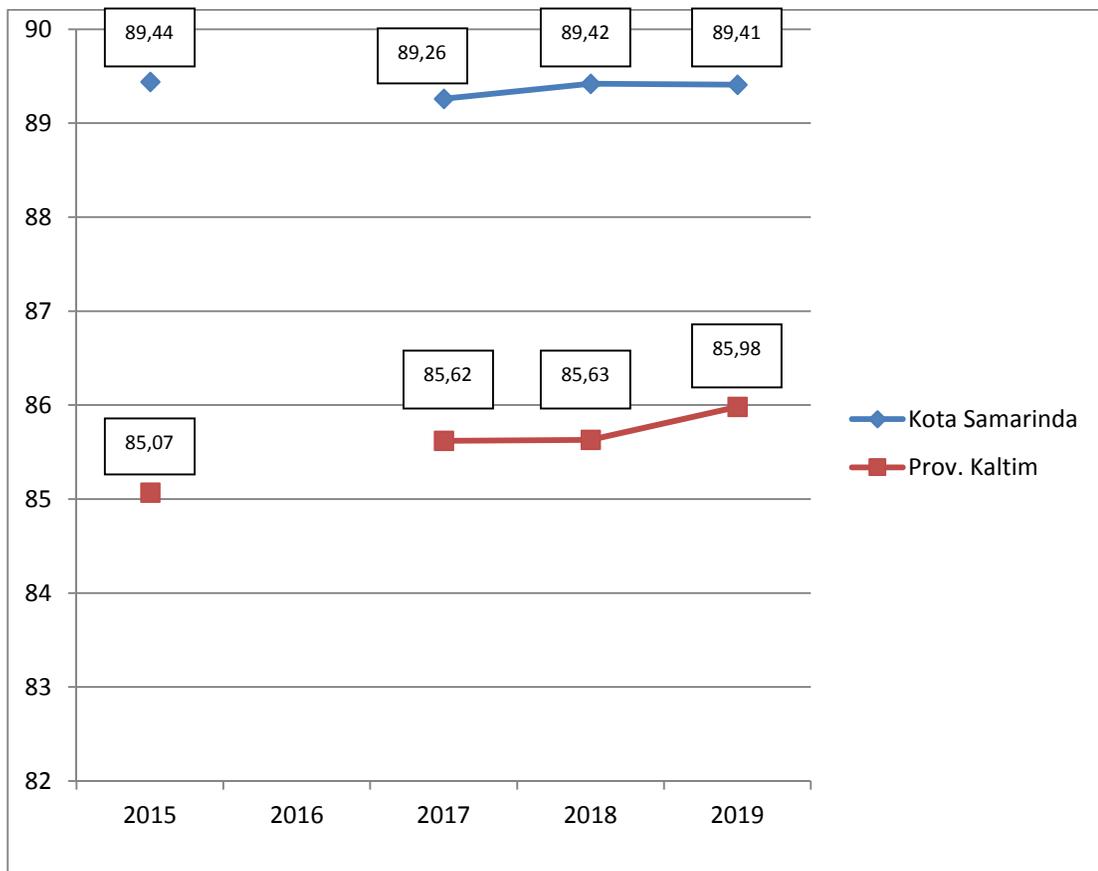
## 3. Akhiri Kesenjangan Ekonomi

- Memastikan K/L terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha
- Memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan
- Menyiapkan sistem permodalan alternative bagi perempuan pelaku usaha mikro
- Mengembangkan dukungan dana / sarana alternatif bagi perempuan inovator

Akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi yang semakin baik terbukti dengan pencapaian IPG yang semakin baik dan meningkat setiap tahun. Berikut dapat dilihat pencapaian IPM , IPG dan IDG Kalimantan Timur dibawah ini :



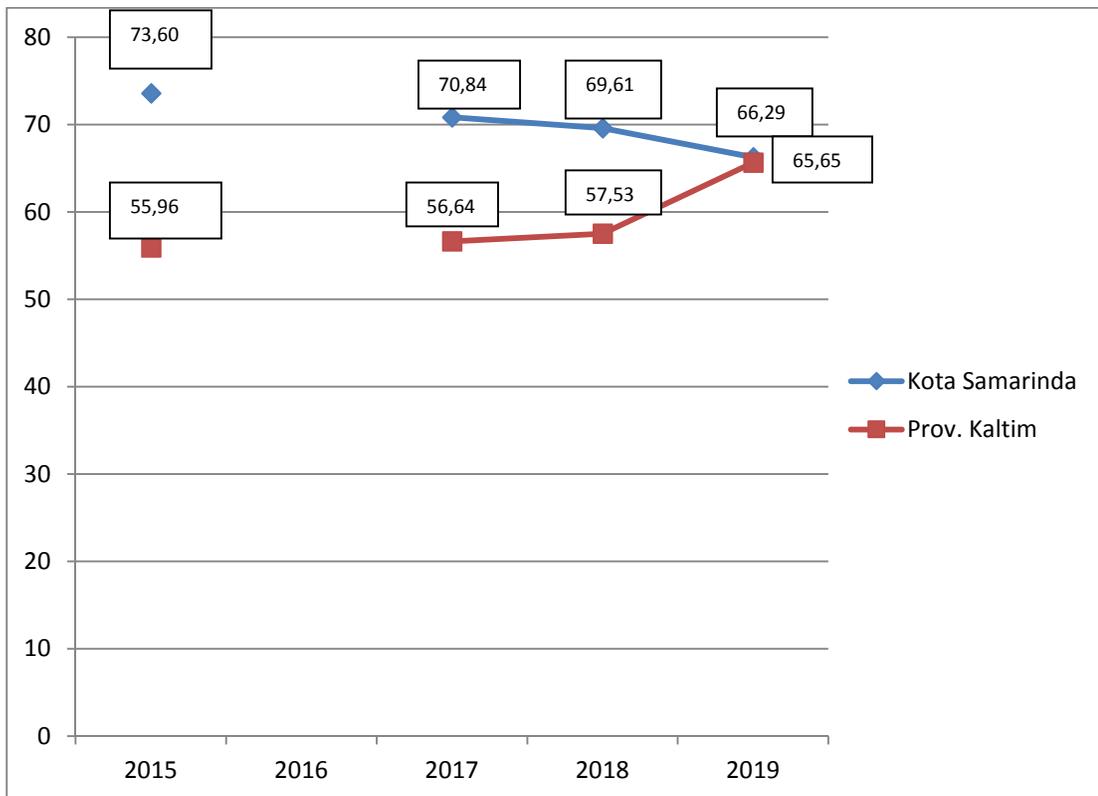
Tabel 3.1  
Diagram IPG Tahun 2015-2019



Dilihat capaian IPG Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut membuktikan bahwa pembentuk dari IPG yang berupa angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita mendukung kenaikan dari nilai IPG tersebut. Namun demikian terjadi pluktuasi penurunan dan kenaikan pada tahun-tahun berikutnya dimana terjadi penurunan sebesar 0,18 dari 89,44 menjadi 89,26 pada tahun 2017, dan kenaikan sebesar 0,16 dari 89,26 menjadi 89,42 pada tahun 2018, dan penurunan sebesar 0,01 dari 89,42 menjadi 89,41 pada tahun 2019.



Tabel 3.2  
Diagram IDG Tahun 2015-2019



Capaian IDG Kota Samarinda cukup baik, pada tahun 2015 hingga 2019 sudah berada di atas IDG Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Samarinda cukup tinggi.



### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.
2. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda juga ditentukan dengan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, yaitu;

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD.

### **3.3 Program dan Kegiatan.**

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari sekretariat dan 4 bidang pada rencana kinerja tahun 2025 terdiri 7 program, 22 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan adalah :

#### **PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

##### **Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kab/kota**

1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan



Kabupaten/Kota.

2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota.
3. Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota.

**Kegiatan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota**

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.

**Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

**Kegiatan pencegahan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/kota**

1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota
2. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota

**Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota**

1. Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota
2. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi



Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota

### **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

### **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

**Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kab/kota**

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota

### **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

**Kegiatan pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kab/kota**

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota



2. Koordinasi dan Sinkronisasi pelebagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kabupaten/Kota

**Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota**

1. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengembangan KIE Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota
4. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota

**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

**Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota**

1. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA.

**Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota**

1. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/



## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

### **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

### **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

### **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan bahan logistik kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Fasilitasi kunjungan tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



### **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

### **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (UPTD PPA)**

#### **Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota**

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota



**Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota**

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota

**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

**Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota**

1. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota
2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK



**Tabel T-C. 33**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA										
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026										
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				9.529.086.800,00				12.637.150.717,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.529.086.800,00				12.637.150.717,00	
2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					12.637.150.717,00	
2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai	8.169.078.967,00		90,5 Nilai	8.507.196.480,00
2	08	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	74 Nilai	300.000.000,00		74,5 Angka Indeks	90.000.000,00



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Dokumen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	75.000.000,00
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5.000.000,00
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	5.000.000,00
2	08	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Berita Acara	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000,00
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	6.192.575.802,00			12Laporan	6.918.942.000,00
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Orang/bulan	5.741.943.069,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Orang/bulan	6.166.697.000,00



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
			Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	400.632.733,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Dokumen	702.245.000,00		
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	50.000.000,00		
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
					Jumlah pegawai		44 Orang	100.000.000,00			44orang	50.000.000,00		
2	08	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Orang	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Orang	50.000.000,00		
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
					Jumlah Laporan		4 Laporan	295.616.000,00			4Laporan	293.254.480,00		
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	6.000.000,00		
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	31.218.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	21.854.540,00		
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	10.000.000,00		



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	21.218.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Paket	21.854.540,00
2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	15.000.000,00
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	212.180.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Laporan	218.545.400,00
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
					laporan rencana kebutuhan barang		1 Laporan	581.887.165,00		1Laporan	810.000.000,00
2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	500.000.000,00
2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	221.887.165,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	250.000.000,00
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Unit	50.000.000,00
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	10.000.000,00
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	314.000.000,00		2Laporan	160.000.000,00



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	164.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	10.000.000,00	
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Laporan	150.000.000,00	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
					Jumlah Laporan Pemeliharaan		4 Laporan	385.000.000,00			4Laporan	185.000.000,00	
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Unit	100.000.000,00	
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	25.000.000,00	
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33 Unit	10.000.000,00	
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	50.000.000,00	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
					Capaian Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Sumbangan Pendapatan Perempuan		68,69 Persentase	359.487.833,00			68,69 Persentase	1.060.924.387,00	
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								
					Jumlah Dokumen Pelebagaan PUG		3 Dokumen	209.487.833,00			3Dokumen	640.924.387,00	



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
			Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota								
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	109.487.833,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	150.023.460,00	
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota								
					Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			275.000.000,00	
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota								
					Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			215.900.927,00	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
					Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja		250 orang	50.000.000,00			250 Orang	150.000.000,00	
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
					Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Organisasi	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Organisasi	150.000.000,00	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
					Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan		2 Layanan	100.000.000,00			2layanan	270.000.000,00	
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Lembaga	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Lembaga	135.000.000,00	



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026											
			Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
					Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	135.000.000,00							
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
					persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO		0.034 Persen	301.500.000,00			0.034 Persen	548.272.000,00							
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
					Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota		110 Kasus	201.500.000,00			100Kasus	274.136.000,00							
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	151.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		1 Dokumen	137.068.000,00							
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Perangkat Daerah	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Perangkat Daerah	137.068.000,00							
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
					Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan		2 Lembaga	100.000.000,00			3Lembaga	274.136.000,00							
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
					Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Orang	137.068.000,00							



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota							
					Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	137.068.000,00
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
					persentase perkawinan anak		1.85 persen	200.000.000,00			1.85 persen	819.545.250,00
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi		8 Lembaga	100.000.000,00			8Lembaga	245.675.000,00
2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Lembaga	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Lembaga	100.000.000,00



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
			Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
					Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	145.675.000,00		
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak		300 Keluarga	100.000.000,00			350keluarga	573.870.250,00	
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan	Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
					Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Layanan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Layanan	573.870.250,00		
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak		4 Dokumen	50.000.000,00			4 Dokumen	327.818.100,00	
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia		4 Dokumen	50.000.000,00			4Dokumen	327.818.100,00	
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	327.818.100,00	



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	08 06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Layak Anak	800 s/d 900 point	320.000.000,00			800 s/d 900 point	1.201.999.700,00	
2	08 06	2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Kota Layak Anak	7 Dokumen	150.000.000,00			7Dokumen	656.363.500,00	
2	08 06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Organisasi	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Organisasi	130.000.000,00
2	08 06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Dokumen	526.363.500,00
2	08 06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		20 Lembaga	170.000.000,00		25lembaga	545.636.200,00
2	08 06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Orang	100.000.000,00



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
			Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	100.000.000,00
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	200.000.000,00
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	145.636.200,00
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		persentase kasus kekerasan terhadap anak	1.60 Persen	129.020.000,00		1.60 Persen	171.394.800,00
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota	120 Kasus	30.000.000,00		115kasus	85.696.000,00
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA							
					Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kegiatan	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Kegiatan	85.696.000,00
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 Lembaga	99.020.000,00		2Lembaga	85.698.800,00
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/							
					Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220 Orang	99.020.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		20 Orang	85.698.800,00



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak					1.565.480.000,00			665.696.000,00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.565.480.000,00			665.696.000,00		
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.565.480.000,00		665.696.000,00		
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO		0.034 Persen	750.000.000,00		0.034 Persen	400.000.000,00
2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan		70 Orang	550.000.000,00		70Orang	335.000.000,00
2	08	03	2.02	0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	550.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70 Orang	335.000.000,00
2	08	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan		2 Lembaga	200.000.000,00		3Lembaga	65.000.000,00
2	08	03	2.03	0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
					Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	65.000.000,00
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase kasus kekerasan terhadap anak		1.60 Persen	815.480.000,00		1.60 Persen	265.696.000,00
2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan		80 Anak	815.480.000,00		80anak 190Orang	265.696.000,00
2	08	07	2.02	0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
					Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Orang	550.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 Orang	180.000.000,00
2	08	07	2.02	0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK							
					Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170 Layanan	265.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		85.696.000,00
					<b>J U M L A H</b>			<b>11.094.566.800,00</b>			<b>13.302.846.717,00</b>



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

#### **IV. Rencana Kerja dan Pendanaan PD**

Berikut kami lampirkan tabel Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 sebagai berikut :



Tabel

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA TAHUN 2025																	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA							12,423,163,408.00							12,637,150,717.00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12,423,163,408.00							12,637,150,717.00		
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						12,423,163,408.00							12,637,150,717.00		
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,5 Nilai			90,5 Nilai	8,225,489,575.00						90,5 Nilai	8,507,196,480.00		
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	74,5 Angka Indeks			74 Nilai	280,093,000.00				7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik		74,5 Angka Indeks	90,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			17 Dokumen	139,828,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan	-	5 Dokumen	75,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			3 Laporan	47,815,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan	-	1 Laporan	5,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			4 Laporan	50,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan	-	1 Laporan	5,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	42,450,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya	-		5,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan			12 Laporan	6,332,323,410.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	12 Laporan	6,918,942,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan			36 Orang/bulan	5,842,374,746.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	40 Orang/bulan	6,166,697,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen			4 Dokumen	439,948,664.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	14 Dokumen	702,245,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			5 Laporan	50,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	5 Laporan	50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	44 orang			44 Orang	100,000,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan	Pegawai DP2PA Kota Samarinda	44 orang	50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang			8 Orang	100,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan	Pegawai DP2PA Kota Samarinda	5 Orang	50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	4 Laporan			4 Laporan	231,186,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City		4 Laporan	293,254,480.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	6,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	5. Program Smart City	3 Paket	6,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	15,609,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	5. Program Smart City	2 Paket	21,854,540.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	10,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	5. Program Smart City	5 Paket	10,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	21,218,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	4 Paket	21,854,540.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			2 Laporan	15,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	1 Laporan	15,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan			10 Laporan	163,359,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	10 Laporan	218,545,400.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>laporan rencana kebutuhan barang</i>	1 Laporan			1 Laporan	581,887,165.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan		1 Laporan	810,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	2 Unit			1 Unit	300,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan		2 Unit	500,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2 Unit			1 Unit	221,887,165.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan		2 Unit	250,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit			4 Unit	50,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	4 Unit	50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	10,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Belakangan	-	1 Unit	10,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	315,000,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	2 Laporan	160,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			3 Laporan	165,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	3 Laporan	10,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan			12 Laporan	150,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	11 Laporan	150,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan	4 Laporan			4 Laporan	385,000,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	4 Laporan	185,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit			13 Unit	100,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	13 Unit	100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			2 Unit	25,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	2 Unit	25,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit			13 Unit	10,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	-	33 Unit	10,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	250,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan	-	1 Unit	50,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Capaian Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Sumbangan Pendapatan Perempuan	68,69 Persentase			68,69 Persentase	307,608,833.00						68,69 Persentase	1,060,924,387.00	
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelebagaan PUG	3 Dokumen			3 Dokumen	182,919,833.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Perangkat Daerah Kota Samarinda	3 Dokumen	640,924,387.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			3 Dokumen	97,239,833.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Perangkat Daerah Kota Samarinda	3 Dokumen	150,023,460.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELompok SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG</i>				200 Orang	42,540,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Belayanan	Perangkat Daerah Kota Samarinda		275,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	<i>Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota</i>				235 Orang	43,140,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Belayanan	Perangkat Daerah Kota Samarinda		215,900,927.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja</i>	250 Orang			250 orang	42,607,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Organisasi/Lembaga Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	250 Orang	150,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	40 Organisasi			20 Organisasi	42,607,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Organisasi/Lembaga Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	40 Organisasi	150,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan	2 layanan			2 Layanan	82,082,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	2 layanan	270,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	6 Lembaga			4 Lembaga	42,275,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	1 Lembaga	135,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60 Orang			50 Orang	39,807,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	10 Orang	135,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</i>	0.034 Persen			0.034 Persen	321,211,000.00						0.034 Persen	548,272,000.00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</i>	100 Kasus			110 Kasus	223,368,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Masyarakat	100 Kasus	274,136,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen			4 Dokumen	177,226,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISK	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Masyarakat	1 Dokumen	137,068,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah			3 Perangkat Daerah	46,142,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Masyarakat	2 Perangkat Daerah	137,068,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	3 Lembaga			2 Lembaga	97,843,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Aktifis Masyarakat	3 Lembaga	274,136,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60 Orang			150 Orang	48,781,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Aktifis Masyarakat	60 Orang	137,068,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penuh Kebutuhan Spesifik	30 Orang			500 Orang	25,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Aktifis Masyarakat	30 Orang	137,068,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	24,062,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja 4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Aktifis Masyarakat		0.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase perkawinan anak	1.85 persen			1.85 persen	189,840,000.00						1.85 persen	819,545,250.00	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi	8 Lembaga			8 Lembaga	89,840,000.00				7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	8 Lembaga	245,675,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	8 Lembaga			5 Lembaga	42,072,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	8 Lembaga	100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang			150 Orang	47,768,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	100 Orang	145,675,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	350 keluarga			300 Keluarga	100,000,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 4. Penguatan SDM Unggul dan		350 keluarga	573,870,250.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Layanan			6 Layanan	100,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 4. Penguatan SDM Unggul dan		6 Layanan	573,870,250.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	4 Dokumen			4 Dokumen	47,546,000.00						4 Dokumen	327,818,100.00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/Kota yang tersedia	4 Dokumen			4 Dokumen	47,546,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 4. Penguatan SDM Unggul dan	OPD, Lembaga swasta dan lain-lain	4 Dokumen	327,818,100.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen			1 Dokumen Dokumen	47,546,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	OPD, Lembaga swasta dan lain-lain	4 Dokumen	327,818,100.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Layak Anak	800 s/d 900 point			800 s/d 900 point	306,354,000.00						800 s/d 900 point	1,201,999,700.00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Kota Layak Anak	7 Dokumen			7 Dokumen	142,849,000.00				7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	OPD, LM, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak Kota Samarinda, Anak menjadi korban kekerasan, anak usia 12-18 Tahun	7 Dokumen	656,363,500.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi			40 Organisasi	47,835,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	OPD, LM, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak Kota Samarinda, Anak menjadi korban kekerasan, anak usia 12-18 Tahun	30 Organisasi	130,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen			8 Dokumen	95,014,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	OPD, LM, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak Kota Samarinda, Anak menjadi korban kekerasan, anak usia 12-18 Tahun	8 Dokumen	526,363,500.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	25 lembaga			20 Lembaga	163,505,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	OPD, LM, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak Kota Samarinda, Anak menjadi korban kekerasan, anak usia 12-18 Tahun	25 lembaga	545,636,200.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang			150 Orang	47,835,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	OPD, LM, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak Kota Samarinda, Anak menjadi korban kekerasan, anak usia 12-18 Tahun	200 Orang	100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			3 Dokumen	20,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	OPD, LM, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak Kota Samarinda, Anak menjadi korban kekerasan, anak usia 12-18 Tahun	3 Dokumen	100,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			4 Dokumen	47,835,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 4. Penguatan SDM Unggul dan Berprestasi	OPD, LM, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak Kota Samarinda, Anak menjadi korban kekerasan, anak usia 12-18 Tahun	3 Dokumen	200,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			4 Dokumen	47,835,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	OPD, LM, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak Kota Samarinda, Anak menjadi korban kekerasan, anak usia 12-18 Tahun	3 Dokumen	145,636,200.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>persentase kasus kekerasan terhadap anak</i>	1.60 Persen			1.60 Persen	132,334,000.00						1.60 Persen	171,394,800.00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota</i>	115 kasus			120 Kasus	26,977,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Masyarakat, Orang Tua, OPD, Stakeholder dan anak-anak usia dibawah 18 Tahun	115 kasus	85,696,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA														
			<i>Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu</i>	14 Kegiatan			4 Kegiatan	26,977,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Masyarakat, Orang Tua, OPD, Stakeholder dan anak-anak usia dibawah 18 Tahun	14 Kegiatan	85,696,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 Lembaga			2 Lembaga	105,357,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Lembaga layanan perlindungan anak	2 Lembaga	85,698,800.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/														
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	20 Orang			220 Orang	105,357,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Lembaga layanan perlindungan anak	20 Orang	85,698,800.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						2,892,780,000.00								665,696,000.00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,892,780,000.00								665,696,000.00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						2,892,780,000.00								665,696,000.00	
1.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</i>	0.034 Persen			0.034 Persen	548,250,000.00							0.034 Persen	400,000,000.00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan</i>	70 Orang			70 Orang	548,250,000.00				7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Masyarakat, Kelurahan, Kecamatan Kota Samarinda	70 Orang	335,000,000.00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan</i>	70 Orang			200 Orang	548,250,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Masyarakat, Kelurahan, Kecamatan Kota Samarinda	70 Orang	335,000,000.00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	3 Lembaga			2 Lembaga	200,000,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Sarana Prasarana Lembaga	3 Lembaga	65,000,000.00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			3 Dokumen	200,000,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Sarana Prasarana Lembaga	4 Dokumen	65,000,000.00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>persentase kasus kekerasan terhadap anak</i>	1.60 Persen			1.60 Persen	2,344,530,000.00						1.60 Persen	265,696,000.00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan</i>	80 anak 190 Orang			80 Anak	2,344,530,000.00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Anak korban kekerasan (0-18 Tahun)	80 anak 190 Orang	265,696,000.00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan</i>	80 Orang			85 Orang	505,488,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Program Smart City	Anak korban kekerasan (0-18 Tahun)	80 Orang	180,000,000.00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMFK														
			<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan</i>				170 Layanan	1,839,042,000.00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISK	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 5. Penguatan Pelayanan	Anak korban kekerasan (0-18 Tahun)		85,696,000.00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
			<b>J U M L A H</b>					12,623,163,408.00							13,302,846,717.00	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari perubahan RPJMD Kota Samarinda dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, selama tahun 2025 telah tercermin dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2025 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama satu tahun anggaran serta merupakan implementasi tentang RENJA di tahun berikutnya.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ini, telah dapat menggambarkan segala upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Namun masih dibutuhkan kerja keras dari semua pihak dengan melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan pada tahun mendatang, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya dengan terus menerus melakukan evaluasi, monitoring dan inovasi sehingga dapat tercipta kinerja yang lebih baik.